

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERTANAHAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pertanahan dan Lingkungan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini merupakan pedoman bagi kami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku.

Penyusunan Renja 2026 ini melalui proses yang cermat dengan melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal. Kami mengidentifikasi isu-isu strategis, mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta menganalisis potensi dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan relevan, efektif, dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Fokus utama kami pada tahun anggaran 2026 adalah pada penguatan tata kelola pertanahan yang adil dan transparan, serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, menekan sengketa pertanahan, dan menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama semua pihak, baik dari instansi pemerintah terkait, sektor swasta, maupun seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan yang solid dan membawa Dinas Pertanahan dan Lingkungan menuju pencapaian tujuan yang optimal.

Paidi, 10 Agustus 2025.  
Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup  
Aidinnoor S., S.P., M.M.  
NIP. 196608101985091001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
BAB V PENUTUP	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026 merupakan sebuah langkah strategis yang didasarkan pada komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Renja ini tidak hanya sekadar dokumen perencanaan, melainkan juga cerminan dari tanggung jawab dan visi kami dalam mengelola sumber daya pertanahan dan lingkungan hidup yang menjadi aset vital bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan tantangan yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara garis besar, latar belakang penyusunan Renja 2026 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Mandat Peraturan dan Kebijakan Pemerintah: Penyusunan Renja ini adalah amanat dari berbagai regulasi, termasuk undang-undang terkait pemerintahan daerah, peraturan tentang perencanaan pembangunan, serta kebijakan sektoral di bidang pertanahan dan lingkungan hidup. Dokumen ini harus sejalan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.
2. Isu dan Tantangan di Bidang Pertanahan: Permasalahan pertanahan seperti sengketa, tumpang tindih kepemilikan, dan belum optimalnya pemanfaatan lahan masih menjadi tantangan serius. Renja 2026 disusun untuk merespons isu-isu ini melalui program-program yang berfokus pada penataan administrasi pertanahan yang akuntabel, penyelesaian konflik lahan, dan pemanfaatan ruang yang terencana.
3. Tantangan Pelestarian Lingkungan Hidup: Tren peningkatan pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem, serta ancaman perubahan iklim memerlukan respons yang cepat dan terukur. Rencana kerja ini memuat inisiatif strategis untuk

pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan penguatan edukasi publik tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

4. Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya: Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar penting. Kinerja yang telah dicapai, hambatan yang ditemui, serta peluang perbaikan yang teridentifikasi menjadi bahan masukan untuk menyusun program-program yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran pada tahun 2026.
5. Partisipasi Publik dan Kebutuhan Masyarakat: Penyusunan Renja 2026 juga didorong oleh aspirasi dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Melalui berbagai mekanisme komunikasi dan konsultasi, masukan dari berbagai pemangku kepentingan—mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha—menjadi landasan penting untuk merancang program yang benar-benar relevan dan bermanfaat.

## **2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708-Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026 memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan terarah. Dokumen ini dirancang sebagai panduan strategis dan operasional untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan visi pembangunan daerah.

Maksud utama dari penyusunan Renja 2026 adalah untuk:

- **Menerjemahkan Kebijakan Strategis:** Menjadi instrumen formal untuk menerjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan nyata.
- **Menjadi Pedoman Pelaksanaan Tugas:** Menyediakan arahan yang terstruktur dan terukur bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2026.
- **Menjadi Dasar Penganggaran:** Memberikan landasan yang kuat dan rasional untuk menyusun usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), memastikan alokasi sumber daya finansial tepat sasaran dan efisien.
- **Menjadi Alat Akuntabilitas:** Menjadi tolok ukur bagi pimpinan dan masyarakat untuk menilai kinerja Dinas, sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun tujuan spesifik dari penyusunan Renja 2026 adalah:

1. Menyelaraskan Program Kerja: Menciptakan keselarasan antara rencana kerja Dinas dengan prioritas pembangunan daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas, serta kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dan lingkungan hidup.
2. Merumuskan Program dan Kegiatan Efektif: Merancang program dan kegiatan yang inovatif dan terukur untuk mengatasi isu-isu krusial di sektor pertanahan dan lingkungan hidup, seperti penanganan sengketa lahan, pencegahan pencemaran, dan pengelolaan sampah.
3. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya: Memastikan pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan secara optimal dan efisien untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik: Merumuskan target-target kinerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik terkait urusan pertanahan maupun pelestarian lingkungan.
5. Memperkuat Sistem Monitoring dan Evaluasi: Menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN**

Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

##### **BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD**

Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dikaitkan dengan target renstra periode berjalan.

##### **BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

##### **BAB VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.

##### **BAB VII. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis yang telah disusun. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan selama tahun 2024.

#### A. Realisasi Kinerja

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAM	Nilai Efisiensi
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>72 Point</b>	<b>13.417.464.615</b>	<b>72.75 Point</b>	<b>12.949.479.407</b>	<b>101.04</b>	<b>96.51</b>	<b>467.985.208</b>	<b>105%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	94.326.000	100 Persen	72.766.500	100	77.14	<b>21.559.500</b>	130%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	61.150.000	2 Dokumen	53.290.000	100	87.15	<b>7.860.000</b>	115%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	33.176.000	4 Laporan	19.476.500	100	58.71	<b>13.699.500</b>	170%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	8.451.761.115	100 Persen	8.314.350.285	100	98.37	<b>137.410.830</b>	102%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	8.386.189.915	46 Orang/bulan	8.252.422.285	97.87	98.4	<b>133.767.630</b>	99%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	32.785.600	1 Laporan	29.994.000	100	91.49	<b>2.791.600</b>	109%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	32.785.600	4 Laporan	31.934.000	100	97.4	<b>851.600</b>	103%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	88.315.000	100 Persen	60.000.000	100	67.94	<b>28.315.000</b>	147%
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	88.315.000	5 Orang	60.000.000	100	67.94	<b>28.315.000</b>	147%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.649.610.900	100 Persen	2.623.793.356	100	99.03	<b>25.817.544</b>	101%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	50.989.400	1 Paket	50.988.500	100	100	<b>900</b>	100%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	410.729.500	5 Paket	391.280.000	100	95.26	<b>19.449.500</b>	105%
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	38.638.000	1 Paket	34.897.500	100	90.32	<b>3.740.500</b>	111%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	38.604.000	1 Dokumen	38.160.000	100	98.85	<b>444.000</b>	101%

11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	590 Laporan	2.110.650.000	850 Laporan	2.108.467.356	144.07	99.9	<b>2.182.644</b>	144%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	778.728.000	100 Persen	771.450.350	100	99.07	<b>7.277.650</b>	101%
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	226.800.000	9 Unit	223.650.000	100	98.61	<b>3.150.000</b>	101%
13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	551.928.000	3 Unit	547.800.350	100	99.25	<b>4.127.650</b>	101%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	840.983.200	100 Persen	653.638.522	100	77.72	<b>187.344.678</b>	129%
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.090.000	12 Laporan	23.086.500	100	99.98	<b>3.500</b>	100%
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	206.541.000	12 Laporan	123.593.622	100	59.84	<b>82.947.378</b>	167%
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	74.244.000	12 Laporan	59.962.200	100	80.76	<b>14.281.800</b>	124%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	537.108.200	12 Laporan	446.996.200	100	83.22	<b>90.112.000</b>	120%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	513.740.400	100 Persen	453.480.394	100	88.27	<b>60.260.006</b>	113%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	359.886.000	10 Unit	308.517.626	100	85.73	<b>51.368.374</b>	117%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	153.854.400	1 Unit	144.962.768	100	94.22	<b>8.891.632</b>	106%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>105.467.600</b>	<b>100 Persen</b>	<b>87.165.900</b>	<b>100</b>	<b>82.65</b>	<b>18.301.700</b>	<b>121%</b>
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	105.467.600	100 Persen	87.165.900	100	82.65	<b>18.301.700</b>	121%
20	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	105.467.600	1 Dokumen	87.165.900	100	82.65	<b>18.301.700</b>	121%
<b>3</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>100 Persen</b>	<b>14.861.700</b>	<b>100 Persen</b>	<b>14.746.700</b>	<b>100</b>	<b>99.23</b>	<b>115.000</b>	<b>101%</b>
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	14.861.700	100 Persen	14.746.700	100	99.23	<b>115.000</b>	101%
21	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.861.700	1 Dokumen	14.746.700	100	99.23	<b>115.000</b>	101%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.482.425.400</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.876.539.695</b>	<b>100</b>	<b>75.59</b>	<b>605.885.705</b>	<b>132%</b>
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 Persen	2.482.425.400	100 Persen	1.876.539.695	100	75.59	<b>605.885.705</b>	132%
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	10 Dokumen	2.175.681.300	10 Dokumen	1.725.072.355	100	79.29	<b>450.608.945</b>	126%
23	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	306.744.100	1 Dokumen	151.467.340	100	49.38	<b>155.276.760</b>	203%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100 Persen</b>	<b>583.427.400</b>	<b>100 Persen</b>	<b>511.630.800</b>	<b>100</b>	<b>87.69</b>	<b>71.796.600</b>	<b>114%</b>
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100 Persen	29.850.000	100 Persen	27.170.000	100	91.02	<b>2.680.000</b>	110%
24	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.850.000	1 Dokumen	27.170.000	100	91.02	<b>2.680.000</b>	110%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 Persen	553.577.400	100 Persen	484.460.800	100	87.51	<b>69.116.600</b>	114%
25	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	553.577.400	1 Dokumen	484.460.800	100	87.51	<b>69.116.600</b>	114%

6	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.526.762.390</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.449.099.636</b>	<b>100</b>	<b>94.91</b>	<b>77.662.754</b>	<b>105%</b>
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 Persen	1.473.417.490	100 Persen	1.412.443.636	100	95.86	<b>60.973.854</b>	104%
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	145.835.600	1 Dokumen	130.945.300	100	89.79	<b>14.890.300</b>	111%
27	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	493.244.500	1 Dokumen	491.284.620	100	99.6	<b>1.959.880</b>	100%
28	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	1 Dokumen	834.337.390	1 Dokumen	790.213.716	100	94.71	<b>44.123.674</b>	106%
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 Persen	29.560.900	100 Persen	13.454.000	100	45.51	<b>16.106.900</b>	220%
29	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Laporan	29.560.900	1 Laporan	13.454.000	100	45.51	<b>16.106.900</b>	220%
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 Persen	23.784.000	100 Persen	23.202.000	100	97.55	<b>582.000</b>	103%
30	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	1 Kegiatan	23.784.000	1 Kegiatan	23.202.000	100	97.55	<b>582.000</b>	103%
7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>9.314.084.810</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6.999.695.739</b>	<b>100</b>	<b>75.15</b>	<b>2.314.389.071</b>	<b>133%</b>
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 Persen	9.314.084.810	100 Persen	6.999.695.739	100	75.15	<b>2.314.389.071</b>	133%
31	Pengelolaan Kebun Raya	8.4 Ha	1.077.408.010	8.4 Ha	842.772.128	100	78.22	<b>234.635.882</b>	128%
32	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	112.221 Ha	8.236.676.800	112.221 Ha	6.156.923.611	100	74.75	<b>2.079.753.189</b>	134%
8	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>46.560.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>42.926.500</b>	<b>100</b>	<b>92.2</b>	<b>3.633.500</b>	<b>108%</b>
	Penyimpanan sementara Limbah B3	100 Persen	46.560.000	100 Persen	42.926.500	100	92.2	<b>3.633.500</b>	108%
33	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	23.280.000	1 Dokumen	22.271.500	100	95.67	<b>1.008.500</b>	105%
34	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	3 Laporan	23.280.000	3 Laporan	20.655.000	100	88.72	<b>2.625.000</b>	113%
9	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>91.556.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>89.680.000</b>	<b>100</b>	<b>97.95</b>	<b>1.876.000</b>	<b>102%</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	91.556.000	100 Persen	89.680.000	100	97.95	<b>1.876.000</b>	102%
35	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1 Dokumen	44.906.000	1 Dokumen	43.165.000	100	96.12	<b>1.741.000</b>	104%

36	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7 Badan Usaha	46.650.000	7 Badan Usaha	46.515.000	100	99.71	135.000	100%
10	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>16.808.800</b>	<b>100 Persen</b>	<b>5.440.000</b>	<b>100</b>	<b>32.36</b>	<b>11.368.800</b>	<b>309%</b>
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100 Persen	16.808.800	100 Persen	5.440.000	100	32.36	11.368.800	309%
37	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	16.808.800	1 Dokumen	5.440.000	100	32.36	11.368.800	309%
11	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>100 Persen</b>	<b>246.497.500</b>	<b>100 Persen</b>	<b>231.493.000</b>	<b>100</b>	<b>93.91</b>	<b>15.004.500</b>	<b>106%</b>
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	246.497.500	100 Persen	231.493.000	100	93.91	15.004.500	106%
38	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3 Entitas	246.497.500	3 Entitas	231.493.000	100	93.91	15.004.500	106%
12	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100 Persen</b>	<b>47.650.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>47.145.000</b>	<b>100</b>	<b>98.94</b>	<b>505.000</b>	<b>101%</b>
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 Persen	47.650.000	100 Persen	47.145.000	100	98.94	505.000	101%
39	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	1 Pengaduan	47.650.000	0 Pengaduan	47.145.000	0	98.93	505.000	
13	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>99 Persen</b>	<b>17.125.430.750</b>	<b>91.91 Persen</b>	<b>16.339.182.968</b>	<b>92.84</b>	<b>95.41</b>	<b>786.247.782</b>	<b>97%</b>
	Pengelolaan Sampah	99 Persen	17.125.430.750	91.91 Persen	16.339.182.968	92.84	95.41	786.247.782	97%
40	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	38 Unit	8.018.884.600	38 Unit	7.567.678.217	100	94.37	451.206.383	106%
41	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	3300 Ton	1.363.923.250	4130.14 Ton	1.301.164.032	125.16	95.4	62.759.218	131%
42	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500 Ton	7.742.622.900	1526.13 Ton	7.470.340.719	101.74	96.48	272.282.181	105%

## B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2024 berjumlah Rp **45.018.996.965,-** Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. **40.644.225.345,-** atau sekitar **90,28%**. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	<b>45.018.996.965,-</b>	<b>40.644.225.345,-</b>	<b>90,28</b>
Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah			

## C. Analisis Efisiensi

Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	<b>99,53%</b>	<b>40.644.225.345,-</b>	Efisiensi

### 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50,4	53,33	105,81	50	99,40
		Indeks Kualitas Udara	91,27	97,23	106,53	93,97	103,08
		Indeks Kualitas Lahan	57,36	51,9	90,48	51,94	93,29
2	Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100%	98,82	98,82	90	90

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar ( $\geq 100\%$ ), Sementara itu, terdapat 2 (dua) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Capaian tertinggi diraih pada indikator kinerja Indeks Kualitas Air dengan persentase 105,81% dan Indeks Kualitas Udara dengan persentase 106,53%. Sementara itu 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target adalah Indeks Kualitas Lahan dengan capaian 90,48% dan untuk Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah daerah sebesar 98,82%.

### **2.1. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Balangan**

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Balangan, dilakukan di 2 (dua) sungai, yakni sungai Balangan dan sungai Pitap. Kegiatan pemantauan sungai di Kabupaten Balangan ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) titik sampling dan 1 (satu) titik sampling pada danaudengan waktu sampling yang dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun.

Adapun titik pemantaun untuk perhitungan atau penilaian IKA, Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengambil dari Sungai Balangan dan Sungai Pitap dengan total 6 (enam) titik, frekuensi pemantauan 2 (dua) kali dalam setahun.

Serta pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ada penambahan 3 (tiga) titik dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam setahun. Titik – titik pemantauan tersebut, antara lain:

1. Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan 6 (enam):
  - a. Sungai Balangan :Hulu di Mantuyan, Tengah di Mungkur Uyam dan Hilir di Teluk Karya.
  - b. Sungai Pitap : Hulu di Simpang Bumbuan, Tengah di Pudak dan Hilir di Muara Pitap.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel :
 

Sungai Balangan :Hulu di tabuan, Tengah di Kapul dan Hilir di Paringin Kota.

**Tabel . Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA Existing)**

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	Memenuhi	4	0.222	70	15.56
2	Ringan	13	0.722	50	36.11
3	Sedang	1	0.056	30	1.67
4	Berat	0	0.00	10	0.00
<b>IKA Existing</b>					<b>53.33</b>

Sumber : Permenlhk RI nomor 27 tahun 2021 tentang IKLH

**KATEGORI INDEKS KUALITAS AIR**

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Berdasarkan tabel Perhitungan Indek Kualitas Air (IKA Existing), diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 sebesar **53.33 (kategori sedang)**. Nilai IKA pada tahun 2024 mengalami kenaikan **3.33** dibandingkan nilai IKA di tahun **2023** yaitu **50.00 (kategori sedang)**. Kenaikan

nilai IKA di tahun 2024 di pengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan air sungai, adanya upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengendalian pencemaran air dan dampaknya, pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha/kegiatan, pengawasan tempat-tempat usaha/kegiatan dan pada tahun 2024 tidak adanya pengaduan terkait pencemaran lingkungan.

## **2.2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Balangan**

Kualitas udara ambient di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa CO, HC, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan partikulat.

Untuk mengetahui kualitas udara, maka perlunya dilakukan pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dapat dilakukan dengan metode sesaat dan metode Passive Sampler. Sementara itu, untuk mendapatkan data IKU, metode yang dilakukan yakni dengan menggunakan Passive Sampler. Passive Sampler merupakan program yang dilaksanakan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan sebagai pelaksana teknis dilapangan, sedangkan untuk pengujian parameter, diserahkan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Pemantauan udara dengan metode Passive Sampler dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut. Kegiatan ini dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan 1 (satu) kali dalam setahun dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, KLHK dilaksanakan pada bulan Juli (tahap I)

dan pada bulan September (tahap II), sedangkan DLH Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Oktober (tahap I). Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Balangan dilakukan pada 4 (empat) titik lokasi :

1. Kawasan Perkantoran (Depan Kantor Dinas Pertanahan dan LH Kab. Balangan)  
(S -2.361139 E 115.470806)
2. Kawasan Permukiman (Perumahan SKB Paringin)  
(S -2.331805E 115.463666)
3. Kawasan Industri (Simpang Paringin Over Pass)  
(S -2.296725 E115.475278)
4. Kawasan Padat Transportasi (Depan Terminal Besar Paringin)  
(S -2.336167 E 115.459667)

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari keempat titik pemantauan untuk parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> di Kabupaten Balangan dapat dilihat pada :

Tabel 7. Perhitungan IKU (Parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>)

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks				IKU	
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu			Rataan
		NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) (Nitrogen Dioksida)	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) (Sulfur Dioksida)	NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) (Nitrogen Dioksida)	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) (Sulfur Dioksida)		INDEKS
1	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	5.11	3.44	0.13	0.17	0.15	<b>97.23</b>

Sumber : Perhitungan pada Aplikasi IKLH tahun 2024

Berdasarkan Tabel 7. Perhitungan IKU (Parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>), nilai IKU Kab. Balangan tahun 2024 adalah **97.23**, jika dibandingkan ke dalam rentang kategori IKU pada tabel diatas, maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Udara (IKU)** Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah Kategori **Sangat Baik**. Hasil IKU tahun **2024** mengalami **kenaikan** sebesar **3.26** dibandingkan tahun **2023** adalah **93.97**. Nilai IKU dapat di pengaruhi oleh sumber emisi udara, kondisi cuaca, suhu, curah hujan, dan aktivitas manusia. Kenaikan indeks kualitas udara dipengaruhi oleh luasan hutan yang masih lestari, kebakaran

hutan yang bisa ditanggulangi dengan baik dan curah hujan yang lebih sering pada tahun 2024. Air hujan secara alamiah dapat mengurangi partikel pencemar di udara.

### 2.3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Balangan

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lahan (IKL), menggunakan persamaan berikut:

$$IKL = 100 - \left( (84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100) \right) \times \frac{50}{54,3}$$

Keterangan:

IKL : Indeks Kualitas Lahan

LTL : Luas Tutupan Lahan

LW : Luas Wilayah

**DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal ( $\Sigma$ Rumus W di Tutupan Hutan+Rumus W di Tutupan Belukar)**

Luas Wilayah Kabupaten Balangan adalah **182851.323750957 Ha**. Untuk data Luas Hutan, Luas Belukar Dalam Kawasan, Luas Belukar pada Fungsi Lindung, Kebun Raya dan DKK di dapat dari pusat dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan data luasan RTH didapat dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan.

Tabel 8. Data-Data Untuk perhitungan IKL Kabupaten Balangan Tahun 2024

No	Komponen	Nilai (Ha)
1	Luas Hutan	45752.64
2	Luas Belukar dalam Kawasan	19853.49
3	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	147.33
4	Kebun Raya (data LIPI)	8.5257
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.7773
6	Taman Kehati	0
7	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	120.5784
8	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN)	1326.72
9	DKK	0

Berdasarkan data-data pada tabel diatas, perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Balangan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 9. Perhitungan IKL Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	0.32	51.90	0.00	0.32065339827351	<b>51.90</b>

Sumber : Perhitungan pada Aplikasi IKLH tahun 2024

Keterangan :

TL = Tutupan Lahan

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal ( $\Sigma$ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar)

IKL = PENENTUAN KATEGORI INDEKS KUALITAS LAHAN

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Berdasarkan Tabel 9. Perhitungan IKL Tahun 2024, nilai IKL Kab. Balangan tahun 2024 adalah **51.9**, jika dibandingkan dengan tabel penentuan kategori IKL diatas, maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah Kategori **Sedang**. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0.04 yaitu 51,94.

Hal itu karena adanya inventarisasi ulang lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Balangan. IKL tahun 2024 belum mencapai target karena adanya pengurangan lahan RTH, perluasan jalan, pembangunan gedung serta luasan untuk kebun raya, RTH dan taman kehati tidak bertambah secara signifikan luasannya.

#### 2.4. Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah

Penatagunaan tanah pada Pemerintah Kabupaten Balangan ditekankan pada seberapa banyak bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Balangan, termasuk seberapa banyak bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah mendapatkan sertifikat penggunaan hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional. Pengukuran kinerja penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan diukur dari persentase perbandingan jumlah bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan atau kepentingan umum terhadap keseluruhan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penatagunaan Tanah} = \frac{\text{Jumlah bidang tanah yang digunakan}}{\text{Jumlah seluruh bidang tanah Pemda}} \times 100\%$$

Data penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Bidang Tanah Pemerintah Kabupaten Balangan	Jumlah Bidang Tanah Yang Digunakan	Jumlah Bidang Tanah Yang Belum Digunakan	Persentase Penatagunaan Tanah
2.258	2.222	36	98,41%
1.950	1.927	23	98,82%

#### Permasalahan:

- Peningkatan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan.
- Belum adanya masterplan pengendalian dan pencemaran sungai.
- Penggunaan sumberdaya alternatif yang kurang optimal.
- Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan air.
- Jumlah bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan yang sudah bersertifikat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan. Hal ini berakibat pada kurangnya kredibilitas Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal penatagunaan tanahnya.

- f. Terdapat beberapa bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang masih belum digunakan sehingga kondisinya masih berupa tanah kosong dengan kondisi masih ditumbuhi tanaman dan rerumputan liar.

**Solusi:**

- a. Bahwasannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup tidak saja dari pihak aparat saja melainkan juga diperlukan partisipasi masyarakat, adanya komitmen kepala daerah dan dukungan DPRD, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar instansi terkait di setiap daerah.
- b. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan penerapan aplikasi teknologi pengendalian dan pencemaran sungai.
- c. Sudah terdapat peraturan tentang pengendalian pencemaran air.
- d. Terdapat peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan.
- e. Meningkatkan pendataan aset Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan

**3. Analisis Sosial Ekonomi SKPD.**

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan yaitu pada tujuan daerah :

**A. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pertanahan**

Tujuan daerah meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam misi daerah ke satu yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran daerah yang ingin di capai adalah agar kualitas lingkungan hidup meningkat dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Strategi daerah yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran daerah tersebut adalah dengan :

- a) Meningkatkan Kualitas Air, udara dan lahan.
- b) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
- c) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka strategi daerah tersebut adalah dengan :

1. Pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup;
3. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Pengendalian dampak perubahan iklim;
5. Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola persampahan;
6. Peningkatan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang;
7. Peningkatan pelayanan pengelolaan izin lokaso dan izin membuka tanah;
8. Peningkatan penatagunaan tanah;
9. Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah garapan;
10. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup;
11. Peningkatan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH;
12. Peningkatan pelayanan publik terhadap pengelolaan LH;
13. Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Balangan;
14. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
15. Pengadaan sarana dan prasarana operasional;
16. Akreditasi Laboratorium lingkungan;
17. Peningkatan fasilitasi pelayanan dalam legalisasi asset (sertifikasi) milik Pemerintah Daerah;
18. Peningkatan Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah.

Pada program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup ada beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan sosial ekonomi masyarakat diantaranya adalah Program pengelolaan persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati).

Keberadaan sampah saat ini telah menjadi masalah nasional, maka kedepannya diharapkan pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Persampahan domestik saat ini lebih banyak dimusnahkan dengan metode in-situ, yaitu dengan dibakar dan dibuang ke lahan-lahan kosong sekitar perumahan. Sementara untuk sampah pasar dan sebagian perumahan perkotaan dikumpulkan dan diangkut ke TPA Batu Merah. Kegiatan pengelolaan sampah eksisting di Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara pengumpulan oleh masyarakat/petugas yang ditunjuk, sampah yang diangkut dari wadah-wadah rumah/persil kemudian dimuat ke gerobak-gerobak untuk selanjutnya dimasukkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sampah-sampah yang dipilah dapat dijual kembali ke pengepul sampah sedangkan sampah basah dimanfaatkan menjadi maggot atau dijadikan pupuk organik dan sampah yang tidak terpakai di angkut ke TPA. Dari kegiatan pemanfaatan sampah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengelolaan persampahan.

Ketersediaan ruang terbuka dan Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Balangan Regulasi yang mengatur batasan minimal sebesar 30% RTH harus dipenuhi secara bertahap. Proses pelaksanaannya memerlukan strategi terobosan untuk dapat membangun RTH publik di Kabupaten Balangan dengan diiringi kualitas dan sebarannya dari tingkat kota, kecamatan, desa kelurahan sampai dusun/lingkungan yang ideal bagi lingkungan yang seimbang. RTH di permukiman

padat di pusat kota atau lingkungan cepat tumbuh menjadi kendala karena ketersediaan lahan.

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan membuka usaha dari makan minum, cinderamata, jasa penyewaan, penginapan, dll sehingga masyarakat dapat manfaat lebih dari ruang terbuka hijau. Sosial, ruang terbuka hijau merupakan tempat/media masyarakat untuk saling berinteraksi mendapatkan kebutuhan rekreatif. RTH juga berfungsi sebagai kegiatan sosial ini terlihat pada beberapa RTH kemudian peran atau fungsi dari RTH sangat terlihat bahwa sumber perekonomian masyarakat dapat terbantu oleh adanya kunjungan masyarakat di RTH.

#### **4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu strategi berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut:

##### **a. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup**

Berdasarkan isu strategis untuk Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut diatas bila dibandingkan dengan kondisi yang ada, maka untuk menangani isu strategis tersebut perlu diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mungkin timbul sebagai berikut:

##### **1. Kekuatan**

- ✓ Komitmen Pimpinan;
- ✓ Regulasi, seperti peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ✓ Potensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ditandai dengan adanya sertifikat;
- ✓ Adanya perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standardisasi meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ecolabel;

- ✓ Adanya program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti, Adipura, Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau, Eco-Office, dll.
- ✓ Kelembagaan;
- ✓ Kebijakan operasional;

#### 1. Kelemahan

- ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana kerja;
- ✓ Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
- ✓ Keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- ✓ Keterbatasan *databases*serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

#### 2. Peluang

- ✓ Koordinasi dan konsultasi;
- ✓ Isu lingkungan telah menjadi isu global;
- ✓ Kerjasama dengan instansi terkait;
- ✓ Kearifan lokal;
- ✓ Adanya perkembangan kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi nonpemerintah;
- ✓ Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### 4. Tantangan

- ✓ Isu lingkungan belum menjadi suatu peluang untuk pembangunan ekonomi;
- ✓ Berbagai bencana alam
- ✓ Kemiskinan
- ✓ Adanya Kepala Daerah yang masih lemah dengan penerapan komitmen pelestarian lingkungan hidup;
- ✓ Peningkatan sistem penegakan hukum;

- ✓ Pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat sehingga memicu konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam baik antarwilayah, antarpusat dan daerah, serta antarpenggunaan.
- ✓ Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih perlu ditingkatkan dengan membiasakan perilaku yang ramah lingkungan.

Berdasarkan isu strategis RPJMD dan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan di atas menjadi landasan bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan untuk membuat perumusan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Cakupan Penanganan Sampah
- b. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup
- c. Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai sebagai sumber air bersih
- d. Peningkatan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta emisi gas buang kendaraan bermotor daerah perkotaan.
- e. Kurangnya tutupan lahan berupa vegetasi hijau;
- f. Permasalahan efek Gas Rumah Kaca
- g. Banjir dan longsor
- h. Meningkatnya kerugian Negara akibat hak-hak Negara dan rakyat yang hilang dalam pemanfaatan SDA dan LH oleh kelompok masyarakat atau pelaku usaha/kegiatan.
- i. Belum optimalnya upaya konservasi SDA;
- j. Terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- k. Belum optimalnya penataan peraturan dan perundangan LH oleh stakeholder (pelaku usaha) dan masyarakat;
- l. Berkurangnya daerah tangkapan air;
- m. Permasalahan sosial kemasyarakatan sehingga perlu perencanaan sosial yang baik dalam penguatan partisipasi masyarakat.
- n. Belum Optimalnya pengelolaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan, secara administrasi maupun secara fisik.

## Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2026 berdasarkan program dan kegiatan yang telah termuat dalam Renstra tahunan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Balangan	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 Point</b>	<b>13.771.987.576</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Balangan	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 Point</b>	<b>15.335.000.000</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	85.724.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	110.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.616.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	48.108.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	60.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	10.018.312.076	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	11.100.000.000

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	9.949.078.076	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	11.000.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.080.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	44.154.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	50.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	100.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	1.880.092.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	2.250.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.587.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	315.013.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	300.000.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	63.684.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	41.961.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	1.399.847.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	1.700.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100 Persen	1.304.961.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100 Persen	1.275.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	339.230.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.998.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	878.231.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	800.000.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	432.897.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	500.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	306.493.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	350.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	126.404.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>272.200.000</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>310.000.000</b>
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Sengketa Terselesaikan	100 Persen	272.200.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Sengketa Terselesaikan	100 Persen	310.000.000
2	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	108.500.000	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	163.700.000	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	160.000.000
	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	<b>100 Persen</b>	<b>25.250.000</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	<b>100 Persen</b>	<b>75.000.000</b>

	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	100 Persen	25.250.000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	100 Persen	75.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	25.250.000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	75.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>854.091.300</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>854.091.300</b>
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 Persen	854.091.300	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 Persen	854.091.300
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	6 Dokumen	854.091.300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	6 Dokumen	854.091.300
	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Penatagunaan Tanah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>728.320.000</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Penatagunaan Tanah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>728.320.000</b>
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	100 Persen	728.320.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	100 Persen	728.320.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	728.320.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	728.320.000
	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>467.975.900</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>500.000.000</b>

4	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	100 Persen	143.548.400	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	100 Persen	150.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	143.548.400	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100 Persen	324.427.500	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100 Persen	350.000.000
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	324.427.500	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	350.000.000
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.633.600.500</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.550.000.000</b>
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100 Persen 100 Persen	1.483.600.600	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100 Persen 100 Persen	2.350.000.000
6	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kab. Balangan	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	129.899.700	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kab. Balangan	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	150.000.000
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Balangan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8 Lokasi	124.599.800	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Balangan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8 Lokasi	150.000.000

	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Kab. Balangan	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	385.491.700	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Kab. Balangan	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	400.000.000
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Balangan	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	109.609.400	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Balangan	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	150.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Balangan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	734.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Balangan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1.500.000.000
7	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diisolasi	100 Persen	49.999.900	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diisolasi	100 Persen	100.000.000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	49.999.900	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	100.000.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Rehabilitasi Lahan	100 Persen	100.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Rehabilitasi Lahan	100 Persen	100.000.000
8	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Balangan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Balangan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	100.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Kab. Balangan	<b>Indeks Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</b>	<b>100 Persen</b>	<b>3.542.840.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Kab. Balangan	<b>Indeks Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</b>	<b>100 Persen</b>	<b>11.000.000.000</b>
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100 Persen	3.542.840.000	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100 Persen	11.000.000.000

9	Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Balangan	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.4 Ha	918.690.600	Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Balangan	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.4 Ha	3.500.000.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Balangan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112.221 Ha	2.624.149.400	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Balangan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112.221 Ha	7.500.000.000
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Limbah B3 yang Terkelola</b>	<b>100 Persen</b>	<b>125.151.200</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Limbah B3 yang Terkelola</b>	<b>100 Persen</b>	<b>200.000.000</b>
10	Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Persentase Kepatuhan Penyimpanan Sementara LB3	100 Persen	125.151.200	Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Persentase Kepatuhan Penyimpanan Sementara LB3	100 Persen	200.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen	75.152.000	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen	100.000.000
	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Balangan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	2 Usaha	49.999.200	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Balangan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	2 Usaha	100.000.000
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>350.400.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	100 Persen	350.400.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	100 Persen	450.000.000
11	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	200.000.000
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	14 Badan Usaha	200.400.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	14 Badan Usaha	250.000.000
	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase MHA (Masyarakat Hukum Adat) yang diakui terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>222.616.100</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase MHA (Masyarakat Hukum Adat) yang diakui terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300.000.000</b>
12	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Persentase MHA yang diusulkan terkait dengan PPLH	100 Persen	222.616.100	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Persentase MHA yang diusulkan terkait dengan PPLH	100 Persen	300.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	222.616.100	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	300.000.000

	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>100 Persen</b>	<b>181.891.600</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300.000.000</b>
13	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100 Persen	181.891.600	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100 Persen	300.000.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	181.891.600	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	300.000.000
	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>150.000.000</b>
14	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 Persen	100.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 Persen	150.000.000
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	100.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	150.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)</b>	<b>30 70 89</b>	<b>10.610.353.500</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Kab. Balangan	<b>Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)</b>	<b>30 70 89</b>	<b>32.000.000.000</b>
	Pengelolaan Sampah	Kab. Balangan	Persentase Sampah yang Didaur Ulang	70	10.610.353.500	Pengelolaan Sampah	Kab. Balangan	Persentase Sampah yang Didaur Ulang	70	32.000.000.000

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit	2.119.052.200	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit	17.000.000.000
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Balangan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300 Ton	1.115.809.700	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Balangan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300 Ton	2.500.000.000
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Balangan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500 Ton	7.375.491.600	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Balangan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500 Ton	12.500.000.000
	TOTAL				32.886.677.676					64.752.411.300

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**Program/Kegiatan.**

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Penatagunaan Tanah
- b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- c. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- e. Program Pengelolaan Persampahan
- f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH.
- j. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- k. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- l. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- m. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- n. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- o. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

**2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2026 adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pertanahan

Indikator Tujuannya adalah :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pertanahan

Sasaran Kinerja Utama yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas lahan
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
5. Persentase Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Terpenuhi

Tabel. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,8	72,1	72,31	72,52	72,73	73,16	73,37
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pertanahan	-	88,57	89,07	89,57	90,07	90,57	91,07
	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	53,33	74,62	74,82	75,02	75,22	75,42	75,62
		Indeks Kualitas Udara	97,23	71,11	71,41	71,71	72,01	72,31	72,61
		Indeks Kualitas Lahan	51,9	69,61	69,68	69,75	69,82	69,89	69,96
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100

### 3. Program dan Kegiatan Prioritas Pendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 Point</b>	<b>13.771.987.576</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	85.724.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.616.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	48.108.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	10.018.312.076
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	9.949.078.076
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.080.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	44.154.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	50.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	1.880.092.700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.587.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	315.013.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	63.684.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	41.961.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	1.399.847.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100 Persen	1.304.961.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	339.230.900
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.998.400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	878.231.700
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	432.897.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	306.493.600
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	126.404.200
2	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase Sengketa Tanah Garapan yang terselesaikan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>272.200.000</b>
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Terselesaikan	100 Persen	272.200.000
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	108.500.000
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	163.700.000
3	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	<b>100 Persen</b>	<b>25.250.000</b>
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	100 Persen	25.250.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	25.250.000
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>854.091.300</b>
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 Persen	854.091.300
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	6 Dokumen	854.091.300

5	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Penatagunaan Tanah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>728.320.000</b>
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	100 Persen	728.320.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	728.320.000
6	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>467.975.900</b>
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	100 Persen	143.548.400
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	143.548.400
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100 Persen	324.427.500
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	324.427.500
7	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.633.600.500</b>
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100 Persen 100 Persen	1.483.600.600
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	129.899.700
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8 Lokasi	124.599.800
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	385.491.700
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	109.609.400
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	734.000.000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diisolasi	100 Persen	49.999.900
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	49.999.900
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Lahan	100 Persen	100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	100.000.000
8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	<b>100 Persen</b>	<b>3.542.840.000</b>
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Persen	3.542.840.000
	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,4 Ha	918.690.600
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112.221 Ha	2.624.149.400

9	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Limbah B3 yang Terkelola</b>	<b>100 Persen</b>	<b>125.151.200</b>
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Kepatuhan Penyimpanan Sementara LB3	100 Persen	125.151.200
	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen	75.152.000
	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	2 Usaha	49.999.200
10	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>350.400.000</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	100 Persen	350.400.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	150.000.000
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	14 Badan Usaha	200.400.000
12	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Persentase MHA (Masyarakat Hukum Adat) yang diakui terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>222.616.100</b>
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diusulkan terkait dengan PPLH	100 Persen	222.616.100
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	222.616.100
13	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>100 Persen</b>	<b>181.891.600</b>
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100 Persen	181.891.600
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	181.891.600
14	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100.000.000</b>
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 Persen	100.000.000
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	100.000.000

15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)</b>	<b>30 70 89</b>	<b>10.610.353.500</b>
	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Didaur Ulang	70	10.610.353.500
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit	2.119.052.200
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300 Ton	1.115.809.700
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500 Ton	7.375.491.600
	<b>TOTAL</b>			<b>32.886.677.676</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada RPJMD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana sedangkan sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yakni :

Sasaran Kinerja Utama yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas lahan
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
5. Persentase Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Terpenuhi

**Tabel .** Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,8	72,1	72,31	72,52	72,73	73,16	73,37
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pertanahan	-	88,57	89,07	89,57	90,07	90,57	91,07
	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	53,33	74,62	74,82	75,02	75,22	75,42	75,62

		Indeks Kualitas Udara	97,23	71,11	71,41	71,71	72,01	72,31	72,61
		Indeks Kualitas Lahan	51,9	69,61	69,68	69,75	69,82	69,89	69,96
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100

Tabel. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 Point</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>74 Point</b>	<b>13.771.987.576</b>			<b>74 Point</b>	<b>15.335.000.000</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	85.724.000			100 Persen	110.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Balangan	2 Dokumen	37.616.000			2 Dokumen	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Balangan	4 Laporan	48.108.000			4 Laporan	60.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	10.018.312.076			100 Persen	11.100.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	Kab. Balangan	52 Orang/bulan	9.949.078.076			52 Orang/bulan	11.000.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Balangan	1 Laporan	25.080.000			1 Laporan	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Balangan	4 Laporan	44.154.000			4 Laporan	50.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	50.000.000			100 Persen	100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Balangan	10 Orang	50.000.000			10 Orang	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	1.880.092.700			100 Persen	2.250.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Balangan	1 Paket	59.587.500			1 Paket	100.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Balangan	5 Paket	315.013.200			5 Paket	300.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Balangan	1 Paket	63.684.000			1 Paket	100.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	41.961.000			1 Dokumen	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	Kab. Balangan	288 Laporan	1.399.847.000			288 Laporan	1.700.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	1.304.961.000			100 Persen	1.275.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Balangan	1 Laporan	36.500.000			1 Laporan	50.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Balangan	12 Laporan	339.230.900			12 Laporan	350.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Balangan	12 Laporan	50.998.400			12 Laporan	75.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Balangan	12 Laporan	878.231.700			12 Laporan	800.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	432.897.800			100 Persen	500.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Balangan	11 Unit	306.493.600			11 Unit	350.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Balangan	1 Unit	126.404.200			1 Unit	150.000.000
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase Sengketa Tanah Garapan yang terselesaikan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>272.200.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>310.000.000</b>
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Terselesaikan	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	272.200.000			100 Persen	310.000.000
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	108.500.000			1 Dokumen	150.000.000
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	Kab. Balangan	4 Berita Acara	163.700.000			4 Berita Acara	160.000.000
<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>25.250.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>75.000.000</b>
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	25.250.000			100 Persen	75.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	25.250.000			1 Dokumen	75.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>854.091.300</b>			<b>100 Persen</b>	<b>854.091.300</b>
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	854.091.300			100 Persen	854.091.300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	6 Dokumen	Kab. Balangan	6 Dokumen	854.091.300			6 Dokumen	854.091.300
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Penatagunaan Tanah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>728.320.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>728.320.000</b>
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	728.320.000			100 Persen	728.320.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kab. Balangan	4 Laporan	728.320.000			4 Laporan	728.320.000
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>467.975.900</b>			<b>100 Persen</b>	<b>500.000.000</b>
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	143.548.400			100 Persen	150.000.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	143.548.400			1 Dokumen	150.000.000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	324.427.500			100 Persen	350.000.000
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	324.427.500			1 Dokumen	350.000.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.633.600.500</b>			<b>100 Persen</b>	<b>2.550.000.000</b>
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100 Persen 100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen 100 Persen	1.483.600.600			100 Persen 100 Persen	2.350.000.000
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	129.899.700			1 Dokumen	150.000.000

Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8 Lokasi	Kab. Balangan	8 Lokasi	124.599.800			8 Lokasi	150.000.000
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	Kab. Balangan	1 Laporan	385.491.700			1 Laporan	400.000.000
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	109.609.400			1 Dokumen	150.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	734.000.000			1 Dokumen	1.500.000.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diisolasi	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	49.999.900			100 Persen	100.000.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	Kab. Balangan	1 Laporan	49.999.900			1 Laporan	100.000.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Lahan	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	100.000.000			100 Persen	100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	100.000.000			2 Kegiatan	100.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>3.542.840.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>11.000.000.000</b>
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	3.542.840.000			100 Persen	11.000.000.000
Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.4 Ha	Kab. Balangan	8.4 Ha	918.690.600			8.4 Ha	3.500.000.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112.221 Ha	Kab. Balangan	112.221 Ha	2.624.149.400			112.221 Ha	7.500.000.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Limbah B3 yang Terkelola</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>125.151.200</b>			<b>100 Persen</b>	<b>200.000.000</b>
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Kepatuhan Penyimpanan Sementara LB3	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	125.151.200			100 Persen	200.000.000

Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	75.152.000			1 Dokumen	100.000.000
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	2 Usaha	Kab. Balangan	2 Usaha	49.999.200			2 Usaha	100.000.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>350.400.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	350.400.000			100 Persen	450.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	200.000.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	14 Badan Usaha	Kab. Balangan	14 Badan Usaha	200.400.000			14 Badan Usaha	250.000.000
<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Persentase MHA (Masyarakat Hukum Adat) yang diakui terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>222.616.100</b>			<b>100 Persen</b>	<b>300.000.000</b>
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diusulkan terkait dengan PPLH	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	222.616.100			100 Persen	300.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	Kab. Balangan	1 Dokumen	222.616.100			1 Dokumen	300.000.000
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>181.891.600</b>			<b>100 Persen</b>	<b>300.000.000</b>
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	181.891.600			100 Persen	300.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	Kab. Balangan	3 Entitas	181.891.600			3 Entitas	300.000.000
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100.000.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>150.000.000</b>
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 Persen	Kab. Balangan	100 Persen	100.000.000			100 Persen	150.000.000

Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	Kab. Balangan	1 Pengaduan	100.000.000			1 Pengaduan	150.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)</b>	<b>30 70 89</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>30 70 89</b>	<b>10.610.353.500</b>			<b>30 70 89</b>	<b>32.000.000.000</b>
Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Didaur Ulang	70	Kab. Balangan	70	10.610.353.500			70	32.000.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit	Kab. Balangan	8 Unit	2.119.052.200			8 Unit	17.000.000.000
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300 Ton	Kab. Balangan	3300 Ton	1.115.809.700			3300 Ton	2.500.000.000
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500 Ton	Kab. Balangan	1500 Ton	7.375.491.600			1500 Ton	12.500.000.000

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026 ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta isu-isu strategis yang berkembang.

#### **A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, Renja 2026 telah merumuskan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan lingkungan hidup. Fokus utama Renja ini adalah:

- Peningkatan kualitas pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.
- Penguatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian ekosistem.
- Optimalisasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

#### **B. Saran**

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Renja ini, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Peningkatan Koordinasi dan Sinergi: Penting untuk memperkuat kerja sama antar-bidang di internal dinas, serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.

- Optimalisasi Sumber Daya: Pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi yang tersedia harus dilakukan secara maksimal, tepat sasaran, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian target.
- Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan mengambil langkah korektif sedini mungkin. Hasil evaluasi ini juga akan menjadi masukan berharga dalam penyusunan Renja di tahun berikutnya.

Paringin, Agustus 2025.  
Kepala Dinas Kabupaten Paringin Lingkungan  
hidup.

